



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 170 /KPTS/BAN.KESBANGPOL/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan dalam rangka melaksanakan penelitian dan verifikasi kelengkapan administrasi perlu membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

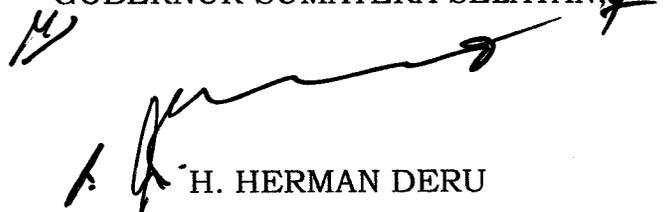
- b. melaksanakan penelitian dan verifikasi kelengkapan administrasi dan persyaratan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang meliputi keaslian dan kebenaran Akte Pendirian, NPWP, Surat Keterangan Kepengurusan, Surat Keterangan Hasil Penetapan Perolehan Kursi dan/atau Suara masing-masing Partai Politik yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. membuat Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi terhadap Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
- d. merekomendasikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) apabila permohonan dimaksud memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang